

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah atau negara menuju keadaan yang lebih baik dalam periode waktu tertentu. Sumitro (1994) menyatakan bahwa suatu perekonomian dinyatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan pada tingkat output (jumlah barang dan jasa) sehingga pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai salah satu indikator Pembangunan Ekonomi Yang mencerminkan tingkat kemajuan dan kesejahteraan wilayah atau negara. Menurut Nordhaus (2004), salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan diantaranya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah. Faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pembentukan modal, dan teknologi.

Pembangunan ekonomi suatu wilayah pada hakekatnya merupakan suatu kesatuan kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Adi, 2006). Tolak ukur pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi sedianya dapat dilihat melalui alat ukur, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan untuk tingkat nasional sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk tingkat daerah (Boediono, 1981: 1).

Peran serta daerah dalam pembangunan nasional sangat signifikan. Setiap daerah mempunyai keunggulan masing-masing baik sumber daya manusia dan sumber daya alam yang beragam. Sebagai contoh daerah provinsi Riau yang memiliki lahan gambut dan minyak bumi tumbuh sangat pesat dan berkontribusi besar terhadap perekonomian indonesia dan alokasi pengeluaran pemerintah daerah meningkat guna memperbaiki pelayanan masyarakat. Daerah provinsi DKI Jakarta mempunyai sumber daya manusia yang bisa bersaing dengan baik dengan perkembangan zaman, oleh karena itu, banyak perusahaan asing yang membuka usahanya di daerah jakarta karena lebih mudah mendapatkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Dampaknya, tumbuhnya perekonomian daerah jakarta juga berdampak pada besarnya alokasi pemerintah pusat terhadap daerah jakarta.

Hal berbeda terjadi di Provinsi Sumatera Barat, meski dikenal sebagai daerah yang menghasilkan wirausahawan. Namun, pertumbuhan ekonomi sumatera barat masih tergolong rendah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat terlihat dari pertumbuhan PDRB harga konstan (2000=100). Seperti yang terlihat pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 2007-2010 nilai PDRB Provinsi Sumatera Barat masih jauh lebih rendah dibanding PDRB Nasional dan tiga provinsi lainnya di Sumatera (Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan).

Tabel 1.1

Perbandingan PDRB Sumatera Barat dengan PDB Nasional dan PDRB Empat Provinsi di Pulau Sumatera (Miliar Rupiah)

Tahun	2011	2012	2013	2014
Sumatera Utara	99 792 (6.90)	106 172 (6.39)	111 561 (5.08)	118 641 (6.35)
Riau	86 213 (3.41)	91 085 (5.65)	93 786 (2.97)	97 702 (4.18)
Sumatera Selatan	55 262 (5.84)	58 065 (5.07)	60 453 (4.11)	63 736 (5.43)
Sumatera Barat	32 913 (6.34)	35 177 (6.88)	36 683 (4.28)	38 860 (5.93)
Nasional	1 878 725 (6.28)	1 999 544 (6.43)	2 094 316 (4.74)	2 221 604 (6.08)

Sumber: BPS, *Indikator Sosial Ekonomi Wilayah se-Sumatera Tahun 2014*

Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat pada 2013 yang tercatat sebesar 4,28 persen mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada 2012 yang sempat mencapai 6,88 persen. Berarti terjadi perlambatan yang cukup besar sekitar 37,79 persen. Dibanding tahun 2013, pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat lebih tinggi mencapai 5,93 persen, tetapi masih rendah dibanding tahun 2012. Pada tahun 2013 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat yang masih rendah serta pertumbuhannya yang berada di bawah nilai dan pertumbuhan ekonomi nasional dan beberapa Provinsi lain di Sumatera. Merupakan masalah yang menarik untuk dikaji mengingat apakah peran pemerintah daerah kab/kota untuk sudah maksimal dalam membantu pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah.

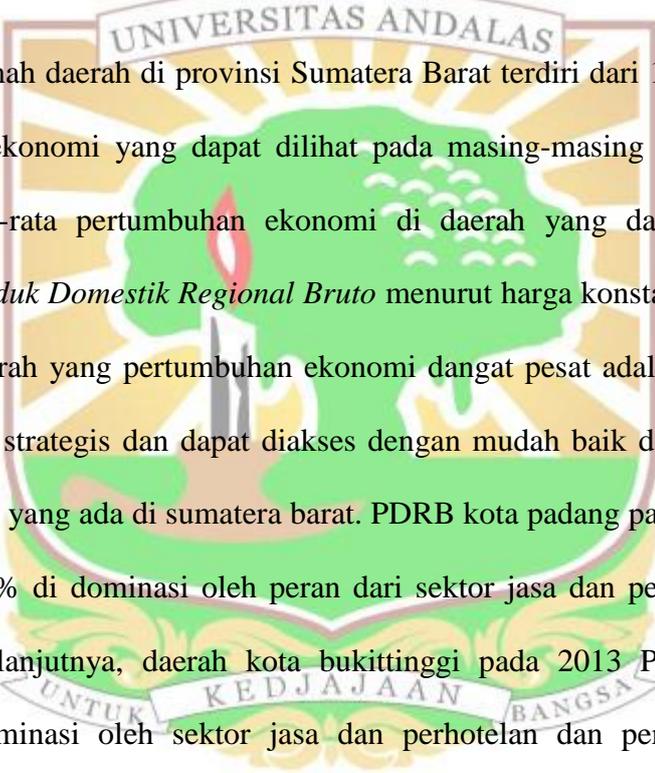
Pengeluaran pemerintah daerah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah, dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Pengeluaran Pemerintah Dilihat dari Belanja Tidak Langsung Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak digunakan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja pemeliharaan. Anggaran belanja tidak langsung memegang peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas yang pada gilirannya akan tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Sementara itu, belanja pegawai yang dimaksud dalam rician belanja tidak langsung ini adalah belanja yang digunakan untuk memberi gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil, penghasilan dan tunjangan bagi anggota DPRD yang ditetapkan sesuai undang-undang dan tambahan penghasilan lainnya dengan persetujuan DPRD.

Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja langsung adalah belanja yang digunakan oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Belanja langsung ini merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Pengeluaran pembangunan daerah

ditujukan untuk membiayai program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi.

Belanja langsung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Untuk belanja pegawai yang dimaksud dalam rincian belanja langsung yaitu belanja yang dikeluarkan dalam bentuk upah yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.



Pemerintah daerah di provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 kab dan kota. Pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat pada masing-masing kab/kota sangat beragam. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah yang dapat dilihat dari presentase *Produk Domestik Regional Bruto* menurut harga konstan adalah 5,14% per tahun. Daerah yang pertumbuhan ekonomi sangat pesat adalah kota padang, terletak sangat strategis dan dapat diakses dengan mudah baik dari provinsi lain maupun daerah yang ada di Sumatera Barat. PDRB kota padang pada 2013 tercatat mencapai 6,66% di dominasi oleh peran dari sektor jasa dan perdagangan serta perhotelan. Selanjutnya, daerah kota Bukittinggi pada 2013 PDRB mencapai 6,28%. Di dominasi oleh sektor jasa dan perdagangan serta industri. Kedua daerah tersebut menjadi penyumbang terbesar PDRB untuk Sumatera Barat. Sedangkan daerah lain tingkat PDRB masih berada pada kisaran 5,00%.

Pertumbuhan ekonomi di dua daerah di Sumatera Barat ini tidak terlepas dari besarnya Anggaran Belanja Daerah. Tercatat bahwa Pengeluaran Pemerintah Kota Padang pada tahun 2014 mencapai Rp. 1.098.973.72 Milyar. Dan Kota

Bukittinggi Pada Tahun 2014 Sebesar Rp. 379.352.86 Milyar Serta Kabupaten Solok Pada Tahun 2014 Sebesar Rp. 721.787.20 Milyar. (Badan Pusat Statistik. SUMBAR.2014). bisa dilihat bahwa besarnya anggaran belanja yang digunakan untuk Pengeluaran *Belanja Tak Langsung Dan Belanja Langsung* daerah di Sumatera Barat ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi msing-masing daerah.

Pengeluaran pemerintah yang tinggi tapi tidak bisa meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan dalam perjalanannya cenderung fluktuatif. Ketidakselarasan antara pengeluaran pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat yang menjadi masalah dalam penelitian ini.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah kab/kota Di Sumatera Barat tahun 2003-2015”**

1.2 Rumusan Masalah

Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi, terutama jenis pengeluaran pemerintah yang menyangkut pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diantaranya melalui kebijakan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang akan mendorong peningkatan permintaan produksi dalam perekonomian. Studi empiris hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda, hal

ini terungkap dari penelitian Purbadharmaja (2006) dan Sodik (2007) yang menunjukkan pengeluaran pemerintah memberi kontribusi nyata dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Barro dalam Alexiou (2009) dan Ramayandi (2003) menunjukkan hubungan negatif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, Anasmen (2009) yang membahas bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah kab/kota di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal Pemerintah tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.

Pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah daerah yang dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kedua pengeluaran tersebut merupakan sektor yang sangat penting bagi proses pembangunan. Pengaruh pengeluaran belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dapat langsung dirasakan dalam jangka pendek.

Hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi bisa positif atau negatif. Hasil dan bukti berbeda pada negara maupun daerah. Sifat dari dampak pengeluaran pemerintah akan tergantung dengan kondisi daerah. Penelitian sebelumnya belum ada yang mencermati pengaruh pengeluaran belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Sumatera Barat. Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yang dikemukakan adalah:

1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi di kab/kota Sumatera Barat?

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kab/kota Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kab/kota Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi kab/kota di Sumatera Barat periode 2003-2015
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Sumatera Barat selama periode 2003-2015
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Sumatera Barat selama periode 2003-2015

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ialah untuk khasanah ilmu pengetahuan, penyelesaian masalah secara operasional dan kebijakan. Dengan demikian, kegunaan tersebut mencakup :

a. Aspek Manfaat :

- Sebagai informasi ilmiah dan wawasan ilmu pengetahuan tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

- Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

b. Aspek Praktis :

Bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran Pemerintah Sumatera Barat dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, yang masing-masing akan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan judul skripsi. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

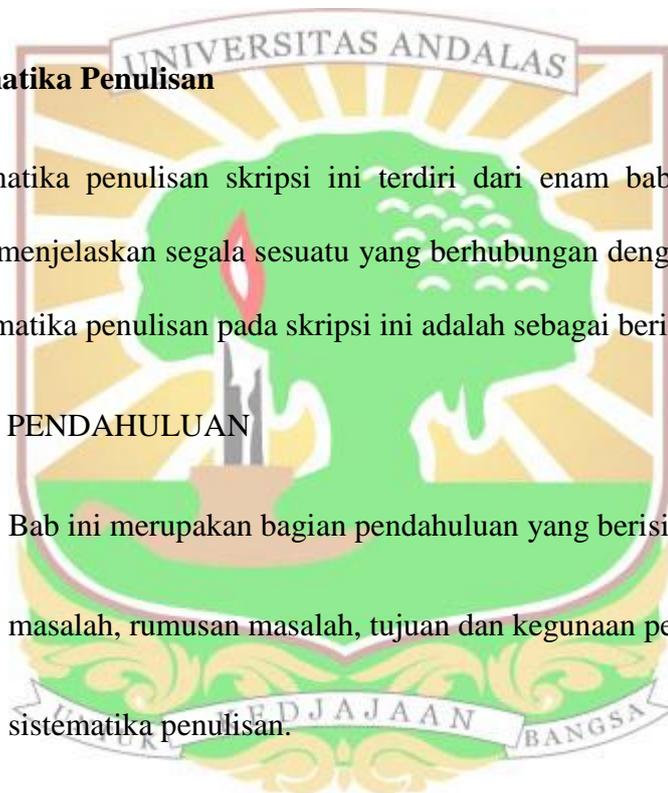
Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan dekripsi tentang bagaimana penelitian akan



dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis

Bab IV : GAMBARAN UMUM

Pada permulaan bab ini akan digambarkan secara singkat keadaan perkembangan pengeluaran pemerintah Atas belanja tak langsung dan belanja langsung serta pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan dilanjutkan dengan analisis data pembahasan.

Bab V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dan pembahasan dari deskripsi objek penelitian dan analisa yang telah didapatkan dari hasil pengolahan data. Penjelasan hasil dimulai dari pemilihan model dan hasil estimasi.

BAB VI : PENUTUP

Ini adalah bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian dan hasil analisis sebagai jawaban atas pertanyaan masalah.

